Regina Rambu Mali Hawa

by UNITRI Press

Submission date: 19-Oct-2023 08:36PM (UTC-0700)
Submission ID: 2001997504
File name: Regina_Rambu_Mali_Hawa.docx (34.87K)
Word count: 1095
Character count: 7678

PELA YANAN PUBLIK DALAM PERSP KTIF GOOD GOVERNANCE

(Studi di Desa Dalisodo, Kee. Wagir, Kah. Malang)

SKRIPSI



OLEH:

REGINA RAMBU MALI HAW A

2019210079

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TRIBHUW ANA TUNGGADEWI

MAL ANG

2023

RINGKASAN

Pelayanan publik dari sudut pandang manajemen yang baik". Pelayanan yang dilakukan oleh birokrat diartikan sebagai kewajiban dan bukan kebebasan karena dilimpahkan oleh otoritas publik untuk melayani daerah setempat. Maksud dari kajian ini adalah untuk mengkarakterisasi adrninistrasi publik dari sudut pandang adrninistrasi yang layak. Menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan yakni primer dan sekunder. Untuk pengumpulan data digunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan informan. Analisisa data meliputi reduksi data, penyajian, dan inferensi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelayanan umum disusun sesuai dengan tanggung jawab tata kelola pemerintahan yang baik pada birokrasi terkait penganggaran pelayanan publik, yang berdampak pada kualitas pelayanan publik, ada hambatan dalam diskrirninasi layanan, ada kurangnya kepercayaan. waktu dan biaya, serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih rendah. sendiri, faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Sementara itu, faktor pendukungnya yaitu pelayanan publik dalam perspektif tata kelola yang baik, tugas penyelenggaraan pelayanan publik di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, ditetapkan peraturan yang dipatuhi pegawai serta melakukan pekerjaan pemeliharaan se uai dengan ketentuan. peraturan yang diberikan. berkunjung dan kerjasama yang baik demi suksesnya pelayanan serta manajer teladan yang mendorong pegawai untuk disiplin. Di Desa Dalisodo Kecamatan Wagir, faktor penghambat proses pelayanan publik adalah kualitas pelayanan publik, hambatan diskriminasi dalam

pelayanan, ketidakpastian waktu dan biaya, dan kurangnya rasa puas masyarakat terhadap pelayanan **umum** dan kurangnya pelayanan. Sosialisasi antara warga desa Dalisodo dengan pekerja agar tidak terjadi ketidakpastian sementara dalam proses pelayanan.

Kata kunci Pelayanan **Publik**, Good Governance, Akuntabilitas

BABI

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Manajemen pada hakikatnya adalah suatu pelayanan sosiaJ, tidak dimaksudkan untuk melayani dirinya sendiri melainkan juga untuk melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang memberdayakan setiap warga negara untuk menumbuhkan kemampuan dan daya ciptanya untuk mencapai tujuan bersama (Rasyid 1998 138). Administrasi Publik wajib dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Administrasi Publik yang baik dan ahli. Dengan demikian, bantuan publik dapat diartikan sebagai melayani (melayani) kebutuhan individu atau jaringan yang berkepentingan dengan asosiasi sesuai dengan prinsip dasar dan metodologi yang telah ditetapkan.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan warga negara menurut penyediaan barang, jasa, dan administrasi. Pelayanan diberikan oleh penyedia layanan umum. Hubungan antara negara dan masyarakat dalam suatu negara sangatlah penting, karena selain pengakuan daerah dan negara lain, berdirinya negara memerlukan adanya orang atau masyarakat. Dalam penyelenggaraan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dikenal berbagai istilah, seperti hukum administrasi publik, hukum administrasi atau konstirusi, dan hukum administrasi publik. Peraruran perundang-undangan negara (peraturan manajerial) merupakan bagian peraturan yang berkonsentrasi pada pelaksanaan penyelenggaraan negara, oleh karena itu dalarn banyak hal disebut peraturan

otoritatif negara. Peraturan otoritatif negara diusahakan dan diterapkan di dalam pengadilan manajerial negara.

Menurut Osborne dan Plastriku (1997), pemerintah (birokrat) sebagaimana asurnsi di atas adalah pemerintah rnempunyai masyarakat, yaitu pemerintah (birokrat) rnelimpahkan kekuasaan kendalinya kepada masyarakat. Masyarakat rnempunyai hak untuk mengawasi pelayanan dari birokrasi. Sangat bagus jika Anda berasumsi bahwa Anda memberikan bantuan kepada daerah setempat karena mereka lebih terlibat, penuh perhatian, dan lebih imajinatif dalam menangani masalah. Administrasi yang diberikan oleh administrator diartikan sebagai kewajiban, bukan kebebasan, karena mereka dipilih oleh otoritas publik untuk melayani wilayah setempat. Dengan cara ini, kewajiban yang kuat untuk rnemberikan dukungan harus dibangun sehingga pemerintah dapat mengatasi masalah-masalah lokal dengan lebih baik dan dapat rnerancang model pemerintahan yang lebih kreatif, layak dan efektif.

Penyelenggara pelayanan dalam rangka pengembangan lebih lanjut penyelenggaraan pernerintahan yang baik sangatlah penting, agar upaya mewujudkan penyelenggaraan administrasi publik dapat dipandang penting oleh para mitra, khususnya otoritas publik, masyarakat, dan dunia usaha. Administrasi publik merupakan ruang tiga komponen eksekutif yang kerjasamanya sangat luar biasa, dan administrasi yang hebat dapat diartikan secara efektif dan praktis melalui administrasi yang terbuka.

Dengan cara demikian, administrasi publik yang baik harus dilaksanakan dalam administrasi yang besar. Hal ini penting karena akhir-akhir ini terdapat banyak permasalahan pada kerangka kerja yang diusulkan kepada masyarakat umum. Suatu

bantuan hendaknya bermanfaat jika bantuan tersebut dapat menjawab permasalahan dan asumsi yang ada di daerah setempat. Memperkirakan pemenuhan kebutuhan publik merupakan bagian penting dalam memberikan pemerintahan yang lebih baik, lebih produktif dan menarik. Apabila masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang diberikan, maka pelayanan tersebut pasti akan menjadi boros dan tidak mampu, ha! ini sangat menguntungkan secara terbuka. Baligi (Soeprapto, 2005).

Latar belakang masalah penelitian adalah adanya diskriminasi pelayanan di masyarakat. Pengertian diskrirninasi dalam masyarakat adalah suatu sikap yang dengan sengaja melakukan diskriminasi terhadap suatu kelompok dalam kaitannya dengan manfaat pelayanan publik. perbedaan pelayanan masyarakat baik individu maupun kelompok. dan dari segi waktu dan biaya pelayanan, sikap yang ditunjukkan dan prosedur yang ditawarkan kepada masyarakat. Perilaku koruptif PNS dalam membayar pelayanan publik, serta penyalahgunaan wewenang dan kurangnya keterampilan menyebabkan ketidakmampuan PNS dalam melayani masyarakat secara profesional, sehingga menyebabkan diskriminasi antara pemerintah kota dan pelayanan publik. pembantu di desa Dalisodo.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, maka harus senantiasa diupayakan peningkatan mutu pelayanan publik untuk menjamin terselenggaranya pelayanan yang bermutu, karena pelayanan umum ialah tugas pokok pemerintahan yang dilaksanakan oleh apararur sipil negara dengan sebaik-baiknya. Salah satu upaya otoritas publik adalah menerapkan standar administra i yang baik, khususnya memberikan bantuan luar biasa kepada daerah setempat. Penataan nilai administrasi publik merupakan salah satu ciri administrasi yang

baik. Oleh karena itu, pejabat publik hendaknya melaksanakan kewajiban dan kewajibannya seeara aktual dan efektif, mengingat penyelenggaraan pemerintahan yang baik diharapkan rnampu membangun kembali kepereayaan rnasyarakat terhadap otoritas publik secara berkesinambungan.

Struktur birokrasi yang terkait dengan penganggaran pelayanan publik yang berdampak pada kualitas pelayanan publik adalah permasalahan diskriminasi pelayanan, ketidakpastian waktu dan biaya, serta rendahnya kepuasan terhadap pelayanan publik.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti mengangkat judul "Pelayanan Publik Dalam Perspektif Good Governance (Akuntabilitas Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang").

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang digunakan ialah:

I. Bagaimana pelayanan publik dalam kaitannya dengan pemerintahan yang baik di Desa Dalisodo Kee. Wagir, Kah. Malang?

2. Apa faktor pemungkin dan penghalang pelayanan umum dalam kaitanya dengan pemerintahan yang baik Di Desa Dalisodo, Kee. Wagir,Kab. Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk meninjau Pelayanan Publik Dalam Perspektif pemerintahan yang baik Di Desa Dalisodo, Kee. Wagir,Kab. Malang

2. Guna meninjau faktor pemungkin dan penghalang Pelayanan Publik Dalam Perspektif pemerintahan yang baik Di Desa Dalisodo, Kee. Wagir, Kah. Malang

1.3 Manfaat Penelitian

Dari uraian diatas peneliti diharapkan mampu memberikan manfaat dalam penelitian ini:

1. Manfaat Akadernis

   Manfaat akadernis bahwa dapat rnenyumbang pernikiran dan pengetahuan dalam bidang pelayanan publik

2. Manfaat Praktis

   Bermanfaat bagi Pernerintahan Desa Dalisodo yang dapat rnemberikan masukan terhadap pelayanan publik dalam konteks Good Governance.

Regina Rambu Mali Hawa

ORIGINALITY REPORT

13%	9%	4%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	3%
2	rinjani.unitri.ac.id Internet Source	1%
3	eprints.utdi.ac.id Internet Source	1%
4	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
5	core.ac.uk Internet Source	1%
6	Ihsan Ahmad. "PERAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI PERGURUAN TINGGI ISLAM DI PAPUA (STUDI KASUS DI STKIP MUHAMMADIYAH SORONG PAPUA BARAT)", Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 2017 Publication	1%
7	Submitted to University of Muhammadiyah Malang Student Paper	1%

8	pdfcoffee.com Internet Source	1 %
9	media.neliti.com Internet Source	1 %
10	lppm.unpam.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG

Regina Rambu Mali Hawa

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8